

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

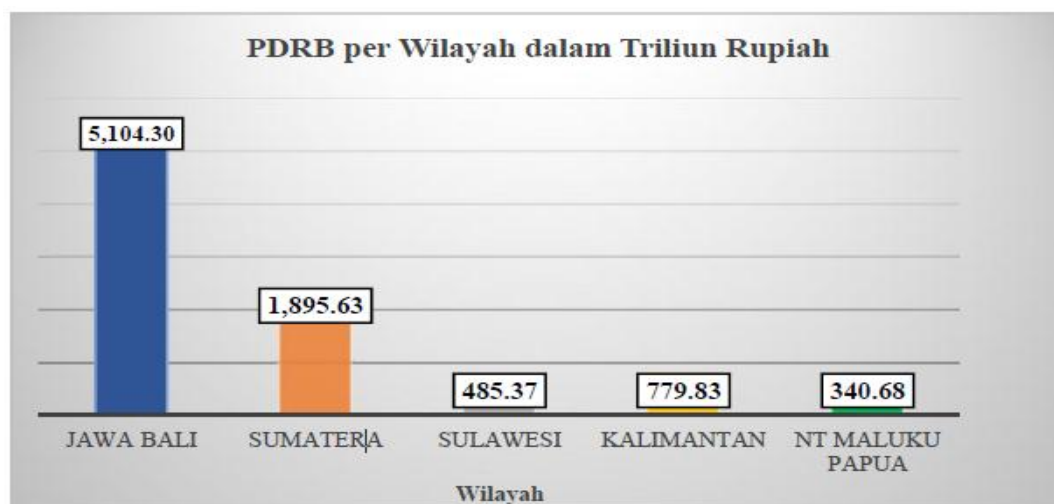
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004. Landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan daerah salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah (Kurniawan, 2010). Dalam konteks wilayah, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi (Tarigan, 2014). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan makin meningkatnya aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian dalam jangka panjang, dan merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan *Modern Economic Growth*.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam

mengonsumsi barang dan jasa, diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat (Yunan, 2009).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Badan Pusat Statistik (2015) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak pulau. Setiap pulau atau wilayah memiliki karakteristik dan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Selama ini, kegiatan perekonomian terpusat pada pulau Jawa, sehingga terjadi ketimpangan antara daerah Jawa dan diluar Jawa.



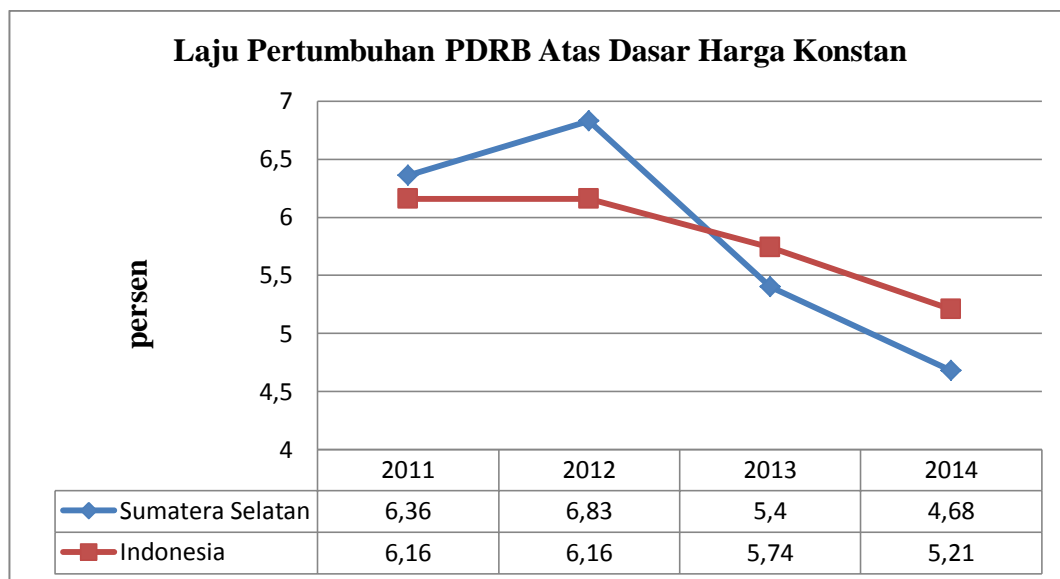
Sumber: BPS, 2015(dalam Singgih,2016)

Gambar 1.1
PDRB per Wilayah Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2014

Pada tahun 2014, Wilayah Jawa Bali memiliki nilai PDRB tertinggi yaitu Rp 5.104 Triliun atau rata-rata per provinsi mencapai Rp 729 Triliun. Wilayah Sumatera memiliki total PDRB Rp 1.895 triliun atau rata-rata PDRB per provinsi Rp 189 Triliun. Sedangkan Sulawesi memiliki total PDRB Rp 485 Triliun dan rata-rata PDRB per provinsi Rp 80 Triliun. Kalimantan rata-rata per provinsi Rp 193 Triliun. Nusa Tenggara, Maluku, dan papua memiliki total PDRB Rp 340

Triliun dan rata-rata per provinsi Rp 56 Triliun, wilayah ini merupakan wilayah dengan rata-rata PDRB per provinsi terendah di Indonesia. Data total PDRB per wilayah tersebut menunjukkan telah terjadi ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu antara Wilayah Jawa dan diluar Jawa.

Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Akan tetapi selama kurun waktu 2012-2014 kinerja perekonomian Provinsi Sumatera Selatan melambat dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,82 persen. Melambatnya kinerja perekonomian bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.



Sumber: BPS, 2015

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

Setiap daerah di Sumatera Selatan memiliki tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berbeda-beda. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2011 sampai 2015, PDRB setiap daerah di Sumatera Selatan rata-rata meningkat. Pada tahun 2011 – 2015 daerah yang memiliki rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi yaitu Kota Palembang sebesar

Rp 48,08 juta sedangkan daerah yang memiliki rata-rata Produk Domestik Regional Bruto terendah yaitu Kabupaten Oku Timur sebesar Rp11,6 juta.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, 2011-2015 (Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
1.	Ogan Komering Ulu	21.232	22.011	22.662	23.157	23.531	22.519
2.	Ogan Komering Ilir	18.014	18.890	19.788	20.486	21.165	19.669
3.	Muara Enim	43.312	46.110	48.417	49.141	52.054	47.807
4.	Lahat	23.972	24.937	25.836	26.521	26.797	25.613
5.	Musi Rawas	25.282	25.115	26.193	27.732	28.750	26.614
6.	Musi Banyuasin	57.434	60.562	61.920	63.780	64.223	61.584
7.	Banyuasin	16.980	17.745	18.557	19.225	20.007	18.503
8.	Oku Selatan	11.870	12.305	12.751	13.266	13.681	12.775
9.	Oku Timur	10.470	11.086	11.715	12.179	12.865	11.663
10.	Ogan Ilir	12.233	13.034	13.791	14.493	14.962	13.703
11.	Empat Lawang	10.810	11.303	11.742	12.074	12.446	11.675
12.	PALI	18.518	19.547	20.539	20.218	20.811	19.927
13.	Mura Utara	23.179	23.415	23.565	25.552	26.031	24.248
14.	Palembang	43.640	46.312	48.304	50.099	52.090	48.089
15.	Prabumulih	19.411	20.678	21.385	23.481	24.257	21.842
16.	Pagaralam	12.070	12.666	13.233	13.693	14.180	13.160
17.	Lubuk Linggau	13.408	14.044	14.285	14.961	15.673	14.474

Sumber: BPS, 2015

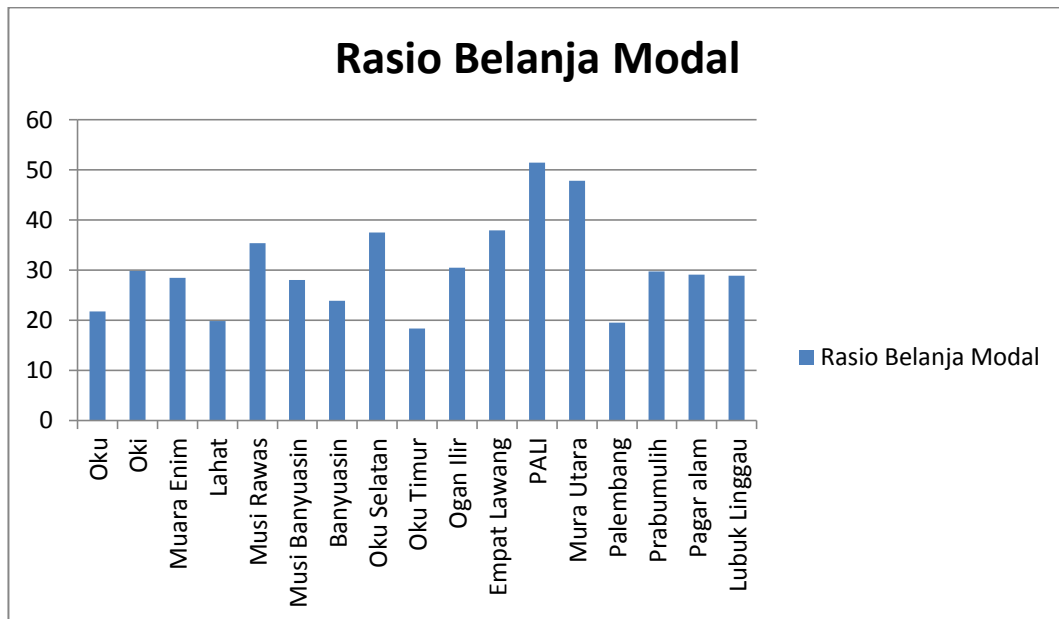
Pada umumnya dalam konsep ekonomi dikenal dua kebijakan ekonomi yang utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan pengendalian sektor moneter sedangkan kebijakan fiskal merupakan pengelolaan anggaran pemerintah (*budget*) dalam rangka mencapai pembangunan (Sriyana, 2005). Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Badan Kebijakan Fiskal, 2014). Pengertian lain mengenai kebijakan fiskal (*Fiscal Policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Sri, 2010). Kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia umumnya merepresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan,

yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian dalam satu periode. Berbagai pilihan tersebut, biasanya dimanifestasikan melalui anggaran pemerintah, di Indonesia lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), digunakan sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan – tujuan yang ingin dicapai dalam pengalokasiannya.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran Belanja Daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah *pro poor, growth, and jobs*. Pada komponen Belanja Daerah juga nampak seberapa besar porsi belanja modal yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (DJP, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, klasifikasi belanja daerah terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu; belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Porsi belanja modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya diharapkan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

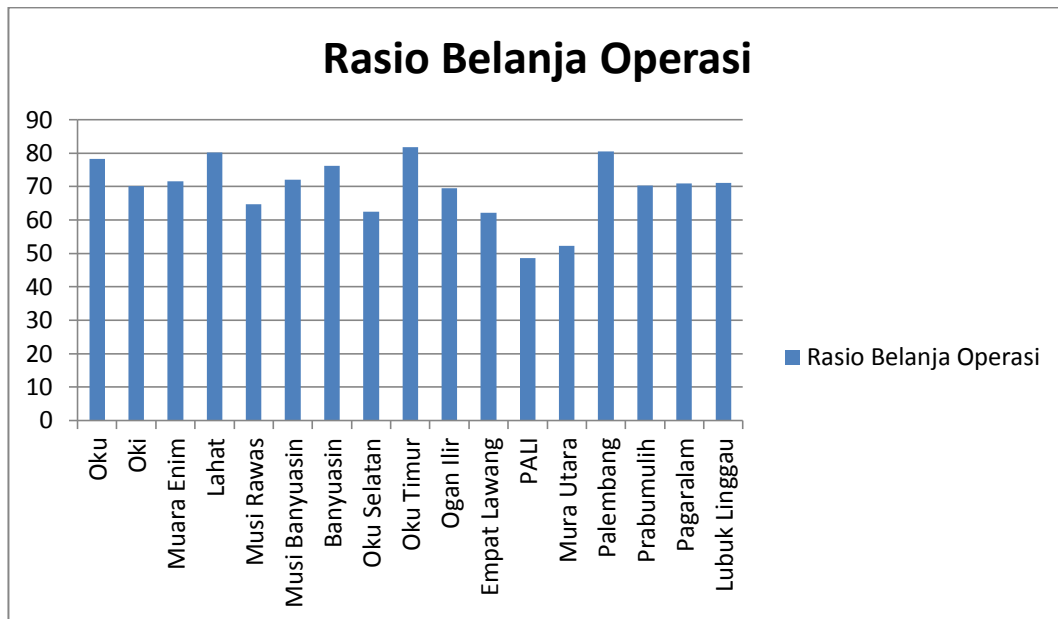


Sumber: DJPK, 2015 (diolah)

Gambar 1.3
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2015

Pada tahun 2015 porsi belanja modal terbesar di Sumatera Selatan berada di Kabupaten PALI yang mencapai 51.39% dari total belanja. PALI merupakan kabupaten pemekaran sehingga sedang berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Sedangkan porsi belanja modal terendah berada Kabupaten Oku Timur, yang hanya mencapai 18.29%, akan tetapi secara keseluruhan porsi belanja modal Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan mencapai nilai di atas 20%, ini berarti Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sedang giatnya melakukan belanja modal untuk pembangunan daerahnya masing-masing.

Selain belanja modal pemerintah terdapat juga rasio belanja operasi yang menunjukkan rasio belanja untuk sektor konsumsi. Hal ini juga ditampilkan pada gambar 1.4.



Sumber: DJPK, 2015 (diolah)

Gambar 1.4
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2015

Pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata porsi belanja operasi Kabupaten/Kota di Sumatera selatan di atas angka 60%. Rasio belanja operasi tertinggi berada pada kabupaten Oku timur yang mencapai 81,70% sedangkan rasio belanja operasi terendah berada Kabupaten PALI yang mencapai 48,60%.

Berdasarkan teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah (Gathama, 2011). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, adalah pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Sodik, 2007).

Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu, fakta menunjukkan bahwa **pertama**, hubungan antara belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi tidak ada yang konsisten, bisa positif bisa negatif atau bisa signifikan dan juga bisa tidak signifikan. Gathama (2011) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan

antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Bagianto (2015) menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. **Kedua**, sifat dari pengeluaran publik atau belanja daerah akan tergantung dari kondisinya. Mengikuti penelitian Barro kontribusi pengeluaran yang produktif akan mempengaruhi pertumbuhan, dan sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif tidak mempengaruhi pertumbuhan. Akhirnya tidak ada pernyataan yang pasti mengenai arah hubungan antara belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi. Hal itulah yang mendorong penulis untuk meneliti ulang mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi ditempat yang berbeda.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh belanja operasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh belanja operasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan dan agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu hanya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui belanja operasi dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun skripsi
2. Bagi akademis, sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Sektor Publik dan sebagai acuan bagi penulisan selanjutnya agar dapat diteruskan dan dikembangkan.
3. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mengambil kebijakan yang dapat memberikan kemajuan pembangunan dalam rangka percepatan dan pengentasan daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi skripsi secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan dan dijabarkan tentang teori-teori yang melandasi dan mempedomani serta menjelaskan secara detail mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang meliputi pengertian Belanja Operasi, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, serta penjelasan mengenai hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai metodologi dari penelitian yang dilakukan yang meliputi jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian, teknik dan pengumpulan data, menjelaskan tentang metode analisis data dan model penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, merupakan bagian terpenting dalam skripsi karena pada bab ini penulis akan menganalisis data-data yang telah diolah berdasarkan data sekunder yang penulis kumpulkan dan peneliti akan memberikan hasil penelitian serta pembahasan tentang penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan simpulan dari isi pembahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah dan penelitian yang akan datang.